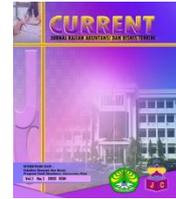




CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
 PENGELOLAAN DANA DESA PADA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND
 MANAGEMENT IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

Bahrul Hayat¹, Desmiyawati Desmiyawati², Suci Nurulita^{3*}

^{1,2,3}*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru*

*Email: nurulitasuci@gmail.com

Keywords

*Internal Control System,
 Financial Report
 Accessibility, Community
 Participation, Utilization
 of Information
 Technology and Village
 Fund Management
 Accountability.*

Article informations

*Received:
 2023-01-27
 Accepted:
 2023-07-17
 Available Online:
 2023-11-29*

Abstract

This study aims to analyze the factors that have an impact on village fund management accountability, which consists of internal control systems, financial report accessibility, community participation, and information technology utilization on village fund management accountability in Kuantan Singingi district. This study is a quantitative research. The population in this study is a village in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The sample in this research is a developing village in Kuantan Singingi, Riau Province and uses purposive sampling method. The type of data used in this research is primary data. Data collection techniques using a questionnaire. The analytical method used is Multiple Regression Analysis. The statistical findings of this study reveal that the factors of Internal Control System, Community Participation, and Information Technology Utilization impact the Accountability of Village Fund Management but not the Accessibility of Financial Reports. As a consequence, it is intended that this research will contribute to the growth of accounting literature, and that the findings would be useful to the Village Government in managing its strategic actions.

DOI : <https://doi.org/10.31258/current.4.3.486-497>

PENDAHULUAN

Kemajuan kesejahteraan nasional tidak dapat dicapai secara konsisten tanpa adanya tanggung jawab dan komunikasi yang jelas antara pihak-pihak yang bertanggung jawab (Chomariyah, Ariyanto, & Hudi, 2016). Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menginginkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pemerintahan desa menggunakan pola pengelolaan keuangan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk bertanggung jawab, atau menjawab dan memberikan penjelasan terhadap kinerja seseorang, entitas hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang berhak atas kewenangan untuk meminta keterangan informasi atau pertanggungjawaban (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Pemerintah desa mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 saat mengelola keuangan dana desa. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dana desa harus dilakukan dengan



transparan, bertanggung jawab dan inklusif, terkendali dan sesuai dengan anggaran yang disiplin (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Pengelolaan dana desa harus dipadukan dengan unsur tata pemerintahan yang baik, yang salah satu dasarnya adalah akuntabilitas atau tanggung jawab.

Terdapat berbagai permasalahan akuntabilitas yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa yang salah satunya yang terjadi di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2016, Kepala Desa Sako dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsidier kurungan badan selama 3 bulan serta membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 400 juta. Kades Sako terbukti melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara Rp 576.652.000 yang ketika itu, Desa Sako mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 1.207.571.000. Dana tersebut di anggarkan untuk program pembangunan, pengoprasian dan pemeliharaan jalan (pembuatan jalan baru dan peningkatan jalan), namun di salah gunakan untuk memperkaya diri sendiri (CK2, 2020). Penyimpangan akuntabilitas pengelolaan dana desa terjadi Ketika dana dari APBN dialokasikan ke desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraann pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat malah di selewengkan untuk keuntungan pribadi oleh pejabat yang berwenang setempat yang melanggar prinsip akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian perlu dikaji faktor-faktor yang dapat memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut guna meminimalisir peluang tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Banyak faktor yang dapat memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu beberapa diantaranya adalah sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi yang mana masih ditemukan adanya kesenjangan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai sistem pengendalian internal yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Aziiz & Prastiti, 2019). Sedangkan yang tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020). Penelitian mengenai ketersediaan laporan keuangan berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Atikasari & Jaeni, 2022) dan (Musdalifah, 2020). Sebaliknya, penelitian yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020).

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017); (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020); dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Sedangkan yang tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurkhasanah, 2019). Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurkhasanah, 2019), (Sapartiningsih, Suharno, & Kristianto, 2018), (Indraswari & Rahayu, 2021), dan (Sugiarti & Yudianto, 2017). Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dibuktikan dalam penelitian oleh (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020), dan (Alauddin & Chuzlan, 2020).

Penelitian ini merupakan replikasi dari sebuah studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Studi tersebut meneliti dan berfokus pada topik Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu Peneliti mengganti variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dengan menambahkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan aksesibilitas laporan keuangan. Penggantian variabel ini

dikarenakan adanya perbedaan studi dari objek yang diteliti serta saran dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang variabel yang berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi karena ada perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu perkembangan penelitian akuntansi, dan secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mempertimbangkan ketika mereka membuat kebijakan baru.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal

Dengan mengontrol kegiatan, sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah acuan pengendalian yang digunakan. SPI berfungsi sebagai referensi penyelenggaraan dan berfungsi sebagai titik acuan untuk pelaksanaan proses yang efektif, dengan memperhatikan prinsip utilitas dan biaya, serta elemen sumber daya manusia yang tersedia. SPI juga digunakan sebagai referensi untuk mengukur efisiensi dan pengembangan teknologi (Romney & Steinbart, 2014).

Pada penelitian (Atiningsih & Ningtyas, 2019) menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, semakin besar sistem pengendalian internal, semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi sistem kontrol oleh pihak internal khususnya inspektorat, maka akuntabilitas Pemerintah desa kepada public dapat semakin besar. Demikian juga dalam penelitian (Puspa & Prasetyo, 2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem pengendalian internal, organisasi akan memungkinkan untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien, mendapatkan kepercayaan dalam pelaporan keuangan, dan melindungi asetnya dengan cukup. Dengan demikian, organisasi akan memiliki keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pemerintah desa harus memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat mengaksesnya dengan mudah, karena ini akan mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Akses yang mudah ini harus diberikan bukan hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan, namun juga kepada masyarakat umum yang telah mempercayai pemerintah desa dalam mengelola keuangan mereka. Afektifitas tanggung jawab bergantung pada laporan pertanggungjawaban dan temuan yang dapat diakses dan dipahami oleh publik. Media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, situs web, dan forum memberikan akses tersebut. Media-media ini memiliki peran atau perhatian langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende, Suresh, & Bennet, 2004).

Hasil penelitian (Musdalifah, 2020) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan desa di Kecamatan Temon memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian (Mustofa, 2012) dan (Fikrian, 2017) juga membuktikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Begitu pula menurut penelitian (Superdi, 2017), aksesibilitas laporan keuangan desa memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jika laporan keuangan lebih mudah diakses, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin tinggi, dan sebaliknya ketika laporan keuangan lebih sulit diakses,



maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tidak jelas. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian adalah:

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat di pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan penguatan masyarakat. Ini mencakup aktivitas yang memungkinkan individu dan kelompok tertentu untuk memengaruhi keputusan publik, seperti halnya pihak privat yang menggambarkan kepentingan mereka (Baum, 2015). Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta semua anggota masyarakat dituntut untuk bekerja sama untuk menjalankan pemerintahan desa. Dengan demikian, musyawarah desa diadakan setidaknya sekali setahun atau sesuai kebutuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Umaira & Adnan, 2019), faktor partisipasi masyarakat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, maka akan lebih akurat pengelolaannya.

Menurut penelitian (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017), partisipasi masyarakat memberikan efek yang baik dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada dasarnya, ada dua aktor yaitu pemerintah dan masyarakat. Masyarakat seharusnya datang dan meminta pemerintah bertanggung jawab agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaan secara tidak sengaja agar implementasi desentralisasi menjadi lebih akuntabel. Studi (Atiningsih & Ningtyas, 2019) menemukan bahwa partisipasi masyarakat baik dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa berarti lebih banyak akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Demikian juga studi yang dilakukan (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020) menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang lebih besar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang transparan dalam mengelola dana desa dapat mengajarkan masyarakat tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa membuat pembangunan desa menjadi lebih mudah bagi perangkat desa, dan pembangunan desa menjadi lebih baik. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat membantu mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena dengan demikian masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan desanya. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi terdiri dari berbagai komponen teknologi, seperti komputer, jaringan, database, perangkat (software dan hardware), dan lainnya (Sugiarti & Yudianto, 2017). Penggunaan teknologi informasi adalah keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi dalam meningkatkan kinerja dan menyelesaikan tugas (Jamil, 2020). Secara prinsip akuntabilitas dan transparansi, orang-orang yang memiliki kepercayaan publik harus bertanggung jawab atas kinerja mereka kepada publik dan memberikan informasi tentang laporan pengelolaan dana desa secara terbuka. Jika akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini meningkat, ketidaksamaan informasi dapat berkurang. Sehingga semakin sedikit ketidaksamaan informasi, maka semakin kecil kemungkinan masalah dengan pengelolaan dana desa (Alauddin & Chuzlan, 2020).

Pada penelitian (Nurkhasanah, 2019) menemukan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, penggunaan teknologi informasi sangat membantu karena dapat memudahkan aparatur dalam berhubungan dengan kewenangan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam penelitian (Alauddin & Chuzlan, 2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika teknologi informasi digunakan dalam pengelolaan desa, akuntabilitas juga meningkat. Ini karena semua data dan informasi terintegrasi dan dioperasikan menggunakan teknologi canggih. Menurut penelitian (Indraswari & Rahayu, 2021), penggunaan teknologi informasi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan komputer dan teknologi informasi membantu staf desa dalam mengelola semua dokumen. Komputer memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam Menyusun laporan keuangan pemerintah desa. Dengan adanya komputer, aparatur desa dapat memasukkan data dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode manual. Penggunaan komputer juga memberikan keunggulan dalam menghasilkan operasi data yang lebih akurat dan tepat, yang berarti bahwa kesalahan akan lebih sedikit. Dengan demikian maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah desa berkembang yang ada di kabupaten Kuantan Singingi. Wilayah kabupaten Kuantan Singingi mencakup 15 kecamatan yang berjumlah 218 desa, yang mana desa dengan status desa berkembang sebanyak 26 desa berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2022. Pemilihan desa berkembang untuk diteliti dikarenakan desa ini sudah memiliki komputer, jaringan internet ataupun wifi dalam melaksanakan operasional desa dan juga sudah memakai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Teknik sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penentuan sampel jenuh atau *total sampling* dimana seluruh populasi yang akan menjadi sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Sehingga dalam penelitian ini terdapat 26 desa yang akan menjadi sampel, dengan responden setiap desa berjumlah 4 orang yang memiliki jabatan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa/Kerani, Bendahara, dan Kaur Perencanaan dengan periode kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

Teknik Pengumpulan Data

Data dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumen, dan kuesioner (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, kuesioner adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Jenis skala likert digunakan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner. Skala ini menggunakan lima skor, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Berikut adalah tabel definisi operasional setiap variabel:



Table 1
Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

| Variabel | Definisi | Indikator Pengukuran | Skala |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) | Kewajiban atau tanggung jawab orang yang dipercayakan dengan pengelolaan sumber daya melibatkan Tindakan untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Tanggung jawab ini dapat melibatkan individu, entitas hukum, maupun pemimpin dalam memberikan penjelasan mengenai kinerja mereka terhadap pihak yang berwenang menerimanya (Sari & Padnyawati, 2021). | 1. Kejujuran dan Keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi | Likert |
| Sistem Pengendalian Internal (X1) | Siklus peran dan aktivitas semua karyawan secara terus-menerus bertujuan untuk memberikan keyakinan yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). | 1. Lingkungan Pengendalian 2. Aktivitas Pengendalian 3. Penilaian Risiko 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian | Likert |
| Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) | Kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik yang mudah dibaca dan dipahami terhadap laporan keuangan (Mulyana, 2006). | 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. Accesible | Likert |
| Partisipasi Masyarakat (X3) | Partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan termasuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat setempat (Adisasmita, 2006). | 1. Pengambilan keputusan 2. Penyusunan anggaran 3. Pelaksanaan anggaran 4. Afektif 5. Keberlanjutan | Likert |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) | Situasi atau sikap seseorang terhadap penggunaan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja (Aziiz & Prastiti, 2019). | 1. Hardware 2. Jaringan internet | Likert |

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bantuan program computer *statistical product and service solution* (SPSS) versi 20. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, maka analisis data selanjutnya dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang meliputi uji validasi dan uji realibilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedasitas. Uji analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.

Model persamaan regresi yang akan diujikan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Y | = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. |
| α | = konstanta |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ | = koefisien regresi |
| X_1 | = Sistem Pengendalian Internal |
| X_2 | = Aksesibilitas Laporan Keuangan |
| X_3 | = Partisipasi Masyarakat |
| X_4 | = Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| e | = standar error |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa yang berada di Kabupaten Kuansing. Penelitian ini menggunakan data primer dengan data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Kuansing yang memiliki jabatan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa/Kerani, Bendahara, Kaur Perencanaan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat. Kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak 104 kuesioner dan dari seluruh kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti, terdapat 90 kuisoner yang dapat kembali dan dapat diolah oleh peneliti.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (Y) yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa serta variabel independen (X) yaitu Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hasil pengujian terhadap variabel-variabel tersebut bersifat deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

| | N | Minium | Maximum | Mean | Std. Devisiasi |
|-----------------------------------------|----|--------|---------|-------|----------------|
| Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) | 90 | 12,00 | 30,00 | 21,66 | 4,802 |
| Sistem Pengendalian Internal | 90 | 07,00 | 25,00 | 17,13 | 4,856 |
| Aksesibilitas Laporan Keuangan | 90 | 06,00 | 25,00 | 18,52 | 5,204 |
| Partisipasi Masyarakat | 90 | 06,00 | 24,00 | 19,07 | 4,446 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 90 | 06,00 | 25,00 | 19,00 | 4,314 |
| VALID N (listwise) | 90 | | | | |

Sumber : Data olahan SPSS 20.0 (2022)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa semua variabel memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua variabel menunjukkan hasil yang baik. Ini karena fakta bahwa standar deviasi merupakan cerminan dari deviasi yang sangat besar, sehingga penyebaran datanya menampilkan hasil normal dan tidak menimbulkan bias. Berdasarkan hasil jawaban reponden untuk setiap variabelnya rata-rata menjawab pada skala dengan skor 2 (tidak setuju) untuk variable akuntabilitas pengelolaan dana Desa, skor 3 (netral) untuk variable sistem pengendalian internal, skor 2 (tidak setuju) untuk variable aksesibilitas laporan keuangan, skor 3 (netral) untuk variable partisipasi masyarakat, dan skor 4 (setuju) untuk variable pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil uji kualitas data menunjukkan bahwa masing-masing butir pernyataan untuk setiap variable penelitian adalah valid dan reliable yang dibuktikan dengan nilai r hitung di atas kriteria 0,207 ($r \text{ table } df = n - 2, (92 - 2) = 90$) dan koefisien Cronbach Alpha $> 0,70$ sehingga layak untuk digunakan sebagai data penelitian. Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka



diperlukan uji asumsi klasik, dimana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, tidak mengandung adanya heterokedastisitas, dan bebas dari multikolinearitas sehingga layak untuk model penelitian ini untuk dilanjutkan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji t untuk menguji seberapa besar pengaruh suatu variable independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen dengan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji analisis statistic maka didapatkan hasil regresi linier berganda seperti pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

Hasil Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 3,999 | 1,097 | | 3,645 | 0,000 |
| Sistem Pengendalian Internal | 0,858 | 0,086 | 0,858 | 9,940 | 0,000 |
| Aksesibilitas Laporan Keuangan | -0,711 | 0,109 | -0,711 | -6,552 | 0,000 |
| Partisipasi Masyarakat | 0,459 | 0,154 | 0,45 | 2,989 | 0,004 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,388 | 0,120 | 0,388 | 3,227 | 0,002 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data olahan SPSS 20.0 (2022)

Untuk nilai t-tabel pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah periode pengamatan (n) = 90, jumlah variabel (k) = 5, dan degree of freedom (df) = $n-k = 90-5 = 85$ sehingga diperoleh nilai t tabel 1,988. Jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya berpengaruh. Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, namun tidak pada variabel aksesibilitas laporan keuangan yang terbukti tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini.

Tabel 4

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,891 ^a | ,795 | ,785 | 2,22643 |

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Partisipasi masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Sumber : Data olahan SPSS 20.0 (2022)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,795 atau 79,5%. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Partisipasi masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 79,5%, sedangkan sisanya sebesar 20,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pada hasil pengujian hipotesis pertama penelitian ini mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih dan bebas korupsi dengan Upaya melakukan pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1. Pasal tersebut menguraikan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

penting untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Melalui Tindakan ini, tujuan dapat dicapai dengan lebih baik, keandalan laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan, masyarakat desa dapat memiliki keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan rencana (Haryono, 2018). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Atiningsih & Ningtyas, 2019), (Aziiz & Prastiti, 2019), (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018), (Sarah & dkk, 2020), (Fadil, 2020) dan (Puspa & Prasetyo, 2020) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Keberadaan sistem pengendalian internal yang lebih baik atau lebih efektif dan efisien dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di pemerintahan desa. Sebaliknya, sistem pengendalian internal yang lebih rendah atau kurang efektif dan efisien akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa.

Pada hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini. Akan ada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan jika laporan keuangan lebih mudah diakses. Tidak hanya lembaga legislatif dan badan pengawasan yang dapat mengakses laporan keuangan, tetapi juga masyarakat umum yang telah mempercayai pemerintah desa untuk mengelola keuangan. Akuntabilitas yang efektif bergantung pada laporan pertanggungjawaban dan temuan yang dapat dibaca dan dipahami oleh public (Shende, Suresh, & Bennet, 2004). Namun tidak pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan belum mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan berdasarkan dari hasil jawaban responden terkait keterbukaan dan kelengkapan penyajian informasi dalam laporan keuangan desa, serta kemudahan dalam mengakses laporan keuangan melalui berbagai media bagi para *stakeholder* rata-rata menjawab pada skala netral. Diduga media akses yang masih sederhana dan tradisional meskipun sudah menerapkan teknologi informasi serta tidak seluruh *stakeholder* yang dapat diberi kemudahan dalam mengakses informasi laporan keuangan belum mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020), namun tidak konsisten dengan (Mustofa, 2012), (Fikrian, 2017), (Superdi, 2017), dan (Musdalifah, 2020) yang menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada hasil pengujian hipotesis ketiga, terbukti bahwa Partisipasi Masyarakat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan teori *stewardship*, bentuk akuntabilitas pemerintah desa, di mana mereka bertanggung jawab atas semua tindakan mereka kepada masyarakat, akan menyebabkan responsif. Dimensi responsif ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat berkontribusi atau memberikan masukan untuk meningkatkan kemajuan dan pengambilan keputusan di masa depan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alauddin & Chuzlan, 2020), (Atiningsih & Ningtyas, 2019), (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017), (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020), dan (Ayu & Gayatri, 2019) yang membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keberhasilan partisipasi masyarakat berkontribusi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang memungkinkan pelaksanaan program kegiatan keuangan dengan baik.

Pada hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan teknologi informasi sangat berperan dalam mempermudah aparatur dalam mengelola dan memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintahan desa telah memiliki akses internet dan perangkat komputer yang cukup. Oleh karena itu, setiap desa memiliki situs web yang menyediakan informasi tentang program desa dan aplikasi sistem keuangan, yang memudahkan pengelola dana desa untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintahan di atasnya. Hasil penelitian ini



sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti & Yudianto, 2017), (Sapartiningsih, Suharno, & Kristianto, 2018), (Aziiz & Prastiti, 2019), (Nurkhasanah, 2019), (Sarah & dkk, 2020), (Fadil, 2020), dan (Indraswari & Rahayu, 2021) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan bantuan teknologi informasi, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih akuntabel, yang memungkinkan program kegiatan keuangan dilakukan dengan baik. Penggunaan teknologi informasi memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kabupaten Kuantan Singingi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini menegaskan bahwa sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 untuk meraih pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan aktivitas terkait pengelolaan dana desa tidak terlepas dari efektifnya sistem pengendalian internal, aktifnya partisipasi masyarakat serta termanfaatkan teknologi informasi dalam menyediakan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, kurangnya keterbukaan dan kelengkapan penyajian informasi dalam laporan keuangan desa, serta kurang mudahnya dalam mengakses laporan keuangan melalui berbagai media untuk para *stakeholder* membuat aksesibilitas laporan keuangan belum mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dengan mudah untuk di akses para pemangku kepentingan guna dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menambah kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi, khususnya yang membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Desa dalam mengatur langkah-langkah strategisnya.

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan. Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian masih terbatas hanya pada Desa berkembang yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh Pemerintah Desa dalam kawasan tersebut. Pengambilan data dalam penelitian ini hanya berdasarkan kepada isian kuesioner sehingga dimungkinkan terdapat unsur-unsur yang kurang objektif di dalam penyelesaian kuesioner seperti adanya pengisian bersama dalam isian kuesioner tersebut. Selain itu, penulis hanya menggunakan beberapa variabel independen yang diduga masih banyak variabel lainnya yang berkaitan erat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara komprehensif. Sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah luas sampel dan menggunakan variabel mediasi atau variabel moderasi.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alauddin, & Chuzlan, F. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Atikasari, D., & Jaeni. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Kendal. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1212-1222.

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-24.
- Ayu, N. K., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1269-1298.
- Aziiz, M., & Prastiti, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 280-344.
- Baum, S. H. (2015). *Citizen participation*. University of Maryland, College Park, USA.
- Chomariyah, C., Ariyanto, B., & Hudi, N. (2016). Participation Principle On The 2014 Village Law In Coastal Village. *International Journal of Business, Economics and Law*.
- CK2. (2020, Januari 21). *Berita*. (J. Syahrul, Editor) Retrieved from cakaplah.com: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/48600/2020/01/21/korupsi-dana-desa-kades-sako-divonis-45-tahun-penjara#sthash.lsnZo72g.0WgBJuim.dpbs>
- Fadil, M. (2020). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Fikrian, H. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon Faculty of Economics Riau University*, 265–279.
- Haryono, E. E. (2018). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Tahun 2016*. Program Studi Akuntansi FEB-UKSW.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Jamil, N. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu)*. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 106-115.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1).
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon. *Jurnal Akuntansi*, 1-20.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1-6.
- Nurkhasanah, N. (2019). *Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa: studi kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab. Rembang*. Semarang: Doctoral dissertation, UIN Walisongo.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi



- Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 162-172.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. (n.d.). Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 281-298.
- Romney, M., & Steinbart, P. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi ketigabelas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 100-114.
- Sarah, S., & dkk. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Sari, N. M., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2).
- Shende, Suresh, & Bennet, T. (2004). Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration. *UN DESA*.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan; Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; (studi empiris pada satuan kerja; perangkat daerah Kabupaten Sijunjung). *JOM Fekon Faculty of Economics Riau University*, 2015–2029.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* .
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 105-112.